



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/1 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, pada:
- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - B. Dinas Kesehatan;
 - C. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 - D. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
 - E. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - F. Dinas Sosial;
 - G. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - H. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - I. Dinas Ketahanan Pangan;
 - J. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - K. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - L. Dinas Perhubungan;
 - M. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - N. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - O. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - P. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - Q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - R. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - S. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - T. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - U. Dinas Energi dan Sumber Mineral;
 - V. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - W. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - X. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - Y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - Z. Badan Kepegawaian Daerah;
 - AA. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - BB. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - CC. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - DD. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - EE. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - FF. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - GG. Badan Penghubung;
 - HH. Inspektorat;
 - II. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo;
 - JJ. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
 - KK. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi;
 - LL. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
 - MM. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
 - NN. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;
 - OO. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH;
 - PP. Badan Riset Dan Inovasi Daerah,
- yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan Unit Kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan specimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. PT. Bank Jateng (Perseroda).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 12 Januari 2025

P. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/1 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	<p>a. Dr. Uswatun Hasnah, S.Pd, M.Pd NIP. 19760730 200112 2 003 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>b. Inas Nurafika, AMd.Kb.N NIP. 19900810 202201 2 003 Staf Subbag Keuangan</p> <p>c. Siti Wulan Agustiniingsih, SE, MM NIP. 19750804 200803 2 005 Staf Subbag Keuangan</p>	<p>Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pemegang AKPD</p> <p>Bendahara Penerimaan</p> <p>Bendahara Pengeluaran / Administrator KKPD</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor</p> <p>3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>6 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1 Pengadaan Mirip</p> <p>2 Pengadaan Perabot dan Meja Lainnya</p>

D. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	<p>a. Dr.Ir.AR.HANUNG TRIYONO, M.Si NIP. 196611291992031005 Plt. Kepala Dinas PUSDATARU</p> <p>b. KUSTIYARTINI, SE, M.Si NIP. 19690405 199101 2 002 Staf Sub Bagian Keuangan</p> <p>c. RUSMIYATI,SE NIP. 19750911 200701 2 007 Staf Sub Bagian Keuangan</p>	<p>Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pemegang KKPD</p> <p>Bendahara Pengeluaran Administrator KKPD</p> <p>Bendahara Pemerintahan</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3 Ilmungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</p> <p>6 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>7 Penyediaan Rapet Koordinasi dan Koneksi SKPD</p> <p>8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blays Pemeliharaan, Pjajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
2	<p>a. AGUNG PRIHANTONO,ST,M.TECH NIP. 19680612 198811 1 002 Kepala Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknik</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Limas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
b.	<p>IMAM SUWARNO NIP. 19731114 200911 1 001 Staf Sub Bagian Keuangan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>2. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 3. Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 4. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Rekonstruksi Pemantapan SDA WS Kewenangan Provinsi 5. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Bawa</p>
3	<p>a. Dr.Ir.AR.HANUNG TRYONO, M.Si. NIP. 196611261992031005 Plt. Kepala Dinas PUSDATARU</p> <p>b. MUHAMMAD HAZIM FIRRI, Amd.Kb.N. NIP. 20000715 202201 1 002 Staf Sub Bagian Keuangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi</p>
4	<p>a. ANDIS SETYO SEPTYANTOK, ST, M.Eng NIP. 19760922 200501 1 012 Kepala Bidang Sungai, Bendungan Dan Pantai</p> <p>b. SRI HARIYADI, SE, M.Si NIP. 19681220 199803 1 001 Staf Sub Bagian Keuangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 2. Normalisasi/Restorasi Sungai 3. Operasi dan Pemeliharaan Tengul dan Tebing Sungai 4. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi</p>
5	<p>a. Dr.Ir.AR.HANUNG TRYONO, M.Si NIP. 196611291992031005 Plt. Kepala Dinas PUSDATARU</p> <p>b. ERIKA MERLIANA DEWI, A.Md.Kb.n NIP. 199905102022012001 Staf Sub Bagian Keuangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1. Penetapan RTRW Provinsi 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi 2. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Sistem Informasi dan komunikasi Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat 3. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1		3	4
6	<p>a. HENDRA AGUSTIAN, ST NIP. 19830801 200903 1 002 Kepala Balai PSDA Pemali Comal</p> <p>b. LAKSONO WIRAWAN, SE NIP. 19680805 200801 1 008 Staf Balai PSDA Pemali Comal</p> <p>c. EZAR AL MILA, A. Md. NIP. 19860912 202012 1 005 Staf Balai PSDA Pemali Comal</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 3. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman <p>PROGRAM PENYELENGGASAAN PENATAAN RUANG</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
7	<p>a. ANDI SETIAWAN, MT NIP. 19780429 200903 1 005 Kepala Balai PSDA Bodri Kuto</p> <p>b. HENY SETYAWATI, SE NIP. 19720116 200701 2 001 Staf Balai PSDA Bodri Kuto</p> <p>c. YUNE HARIYANTI, SE NIP. 19750614 200701 2 005 Staf Balai PSDA Bodri Kuto</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelek dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya</p> <p>2 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai</p> <p>3 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemertasaan Ruang Daerah Provinsi</p> <p>1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</p>
8	<p>a. AGUS PUJIYANTO, ST NIP. 19790829 200903 1 003 Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juanda</p> <p>b. JARWOTO NIP. 19720315 200701 1 015 Staf Balai PSDA Serang Lusi Juanda</p> <p>c. BAKOH NIP. 19710717 200701 1 034 Staf Balai PSDA Serang Lusi Juanda</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p> <p>Bendahara Pembinaan Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Berang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Muek Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya</p> <p>2 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
9	<p>a. DEBBY TRIASMOJO, ST, MM NIP. 19730613 200501 1 011 Kepala Balai PSDA Bengawan Solo</p> <p>b. AJISETIO UTAMA, S. Sos NIP. 19741010 200701 1 018 Staf Balai PSDA Bengawan Solo</p> <p>c. SUROTO, ST NIP. 19710717 200604 1 005 Staf Balai PSDA Bengawan Solo</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p> <p>1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Pemasang Air Lainnya</p> <p>2. Pengalihan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p> <p>1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</p>
10	<p>a. FREDI NURCAHYA, ST, MT NIP. 19810309 200903 1 004 Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Lok Ulo</p> <p>b. BAMBANG HERNAWAN, SH NIP. 19720115 199401 1 001 Staf Balai PSDA Progo Bogowonto Lok Ulo</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>

NO	NAMA/NIP./JABATAN	KEUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
11	<p>c. AGUS SUKERI NIP. 19680829 200801 1 002 Staf Balai PSDA Progo Bogowono Luk Ujo</p> <p>a. KUSDWIYANTO, ST.M.Eng NIP. 19760122 200501 1 004 Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy</p> <p>b. SUSANTI,SE NIP. 19741126 200812 2 001 Staf Balai PSDA Serayu Citanduy</p> <p>c. GUNARTO NIP. 19730728 200710 1 001 Staf Balai PSDA Serayu Citanduy</p>	<p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p>	<p>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemrintjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pentai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya</p> <p>2 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Pengimbangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permulaan</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemertasaan Ruang Daerah Provinsi</p> <p>1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pentai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya</p> <p>2 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Pengimbangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permulaan</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1		3	4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

PF. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	
1.	<p>Dr. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.S NIP. 19680614 199001 1 001 Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.</p> <p>AYU FITRI PURWANINGSIH, S.STP NIP. 19940314 201609 2 001 Bendahara</p>	<p>Pengguna Anggaran / Pengguna/ Barang / Pemegang KKPD</p> <p>Bendahara Pengeluaran / Administrator KKPD</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Administrasi Kiprawasaan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Facilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<p>2. Drs. EDI WAHYONO, M.Si NIP. 19670722 199603 1 003 (Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi)</p> <p>Dr. TRI SUSILOWATI, SKM, M.Kes. NIP. 197206011992032001 Analisis Penelitian dan Pengembangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, b. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan. 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
<p>3. AKMAL AFF FATAH YASIN, SIP NIP. 19790620 200604 1 008 (Kepala Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi)</p> <p>SRI SUMARNI, S.Sos NIP. 19820318 201101 2 010 Peneliti</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG PELAKSANAAN RISET DAN INOVASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Periklanan, 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi <ol style="list-style-type: none"> a. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
<p>4. AGUNG KOENMARIONO, SH NIP. 19690829 199311 1 001 (Kepala Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi)</p> <p>EVA RUMA PUSPARATHI, S.Sos NIP. 19900530 202012 2 008 Analisis Penelitian</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG FASILITASI DAN PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Data Kelitlabangan dan Peraturan, b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan. 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan Disseminasi Hasil-Hasil Kelitlabangan, b. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
<p>5. Dr. JOKO MULYONO, S.STP M.Si NIP. 19770907 199511 1 001 (Kepala Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi)</p> <p>ARIZA WALANAL MA'LA, ST NIP. 19980928 202203 1 007 Perekrutan Ahli Pertama</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG SDM IPTEK DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelitlabangan dan Ketatalaksanaan, b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

